

Kulon Progo Raih WTP Ke-11 Kali

KULON PROGO - Untuk ke-11 kalinya Pemkab Kulon Progo meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Penilaian LKPD itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan DIY Widhi Widayat kepada Pj Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti di Auditorium BPK RI Perwakilan DIY, Rabu (3/4).

Turut hadir mendampingi Pj Bupati, Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati, Sekda Triyono, Inspektur Daerah Arif Prastowo, dan Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo Taufik Amrullah.

Widhi Widayat menyampaikan, kabupaten/kota di Provinsi DIY lebih cepat dalam menyampaikan LKPD dibandingkan daerah lain. Nilai rata-rata dalam menindaklanjuti temuan juga lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. "Diharapkan kerja sama BPK dan daerah semakin baik sehingga kualitas LKPD tetap terjaga, semakin transparan dan akuntabel," katanya.

Terpisah, Pj Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, capaian WTP 11 kali berturut-turut bagi Pemkab Kulon Progo ini merupakan



KERJA TIM:
Penilaian LKPD diserahkan Kepala BPK Perwakilan DIY Widhi Widayat kepada Pj Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti di Auditorium BPK RI Perwakilan DIY, Rabu (3/4).

hasil kerja sama seluruh komponen daerah dalam pengelolaan APBD.

Menurutnya, prestasi ini pada hakikatnya bukanlah merupakan satu-satunya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun lebih upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.

"Iya, kemarin kami menerima hasil laporan pemeriksaan dari BPK. *Alhamdulillah* hasilnya meraih WTP untuk yang ke-11 kali. Tentu ini usaha yang luar biasa dari teman-teman, khususnya Pemkab Kabupaten Kulon Progo di dalam mempertahankan status WTP

ini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraihnya, sehingga apa yang menjadi keberhasilan di tahun 2023, agar menjadi acuan juga untuk ke depannya," kata Ni Made.

Ni Made berharap hal-hal yang menjadi catatan-catatan dari BPK untuk dapat segera ditindaklanjuti, diperbaiki lagi, sehingga kinerja dari Pemkab Kulon Progo semakin baik lagi. "Apa yang menjadi rekomendasi dari BPK, segeralah bisa diselesaikan. Baik dari sisi administrasi maupun dari sisi teknis yang memang ada hal-hal yang juga perlu ada penekanan di dalam pengawasan dari setiap kegiatan, khususnya di fisik," tambahnya. (*/jko)